



Pengembangan Destinasi Wisata Bahari Berkelanjutan di Pulau Poncan Kota Sibolga

Jessica Stefany Hutagalung¹, Erika Revida²

^{1,2} Universitas Sumatera Utara

Email: jessicahutagalung1608@gmail.com¹, erika@usu.id²

Article Info

Article history:

Received Mei 02, 2026

Revised Mei 14, 2026

Accepted Mei 24, 2026

Keywords:

Pulau Poncan, Pariwisata

Bahari, Pariwisata

Berkelanjutan

ABSTRACT

Pulau Poncan merupakan salah satu destinasi pariwisata bahari di Kota Sibolga yang memiliki potensi besar melalui keindahan pantai, kejernihan air laut, serta kehidupan masyarakat pesisir yang masih alami. Pengembangan destinasi wisata bahari di Pulau Poncan memerlukan pengelolaan yang berkelanjutan agar potensi wisata dapat memberikan manfaat ekonomi tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan destinasi pariwisata bahari berkelanjutan di Pulau Poncan Kota Sibolga menggunakan Teori 4A Cooper dkk. (2008) yang meliputi attraction, accessibility, amenities, dan ancillary services. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pulau Poncan memiliki daya tarik wisata alam yang kuat dan didukung keterlibatan masyarakat lokal dalam aktivitas wisata. Accessibility menuju lokasi wisata telah tersedia melalui transportasi laut, namun masih dipengaruhi faktor cuaca dan keterbatasan sarana transportasi. Amenities dan ancillary services juga telah tersedia, meskipun kualitas fasilitas, koordinasi antar stakeholder, dan sistem pengelolaan destinasi masih memerlukan peningkatan agar pengembangan wisata bahari dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received Mei 02, 2026

Revised Mei 14, 2026

Accepted Mei 24, 2026

Keywords:

Poncan Island, Marine

Tourism, Sustainable Tourism

ABSTRACT

Poncan Island is one of the marine tourism destinations in Sibolga City which has great potential through its beautiful beaches, clear seawater, and natural coastal community life. The development of marine tourism destinations on Poncan Island requires sustainable management so that tourism potential can provide economic benefits without neglecting environmental preservation and the welfare of local communities. This study aims to analyze the development of sustainable marine tourism destinations on Poncan Island, Sibolga City using Cooper et al. (2008) 4A Theory consisting of attraction, accessibility, amenities, and ancillary services. The research method used is qualitative research with a descriptive approach through observation, interviews, documentation, and literature study. The results of the study indicate that Poncan Island has strong natural tourism attractions and is supported by the involvement of local communities in tourism activities. Accessibility to tourist destinations is available through sea transportation, although it is still influenced by weather factors and limited transportation facilities. Amenities and ancillary services are also available, although the quality of facilities,



coordination among stakeholders, and destination management systems still need improvement so that marine tourism development can run more optimally and sustainably.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Jessica Stefany Hutagalung

Universitas Sumatera Utara

Email: jessicahutagalung1608@gmail.com

PENDAHULUAN

Menurut laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2022), sektor pariwisata bahari Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, meskipun sempat terdampak oleh pandemi COVID-19. Menurut Sero (2010), wisata bahari merupakan bentuk wisata yang mengandalkan potensi pantai dan laut sebagai daya tarik utama, yang didasarkan pada keindahan alam, keunikan ekosistem, serta kearifan budaya masyarakat pesisir. Artinya, pengembangan wisata bahari tidak hanya menitikberatkan pada aspek alamiah, tetapi juga harus mempertimbangkan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengalaman wisata.

Tabel 1. Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia

No	Tahun	Total Kunjungan (Juta Jiwa)	No	Tahun	Total Kunjungan (Juta Jiwa)
1	2016	11.519.275	6	2021	1.557.530
2	2017	14.039.799	7	2022	5.889.031
3	2018	15.810.305	8	2023	11.677.825
4	2019	16.106.954	9	2024	13.902.420
5	2020	4.052.923	10	2025	15.386.646

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Kota Sibolga, yang terletak di pesisir barat Pulau Sumatera, merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi besar untuk dijadikan sebagai daerah tujuan wisata, khususnya dalam sektor pariwisata bahari. Kota Sibolga juga menjadi Kota paling terkecil dari tujuh kota terkecil yang ada di Indonesia dengan luas wilayah administrasi sebesar 10,77 km², yang terdiri dari 8,89 km² daratan dan 1,88 km² kepulauan, Kota Sibolga memiliki kondisi geografis yang strategis dan keindahan alam yang memikat, seperti pantai-pantai indah di Teluk Tapian Nauli serta sejumlah pulau eksotis yang mengelilinginya menjadi daya tarik wisata yang potensial. Selain itu, Kota Sibolga juga dikenal dengan kekayaan alam bawah laut yang sangat ideal untuk kegiatan wisata seperti diving, snorkeling, serta memancing. Keindahan alamnya yang meliputi pantai, taman laut, serta pegunungan, hal ini menjadikan Kota Sibolga sangat potensial untuk dijadikan sebagai Daerah Tujuan Wisata (DTW). Salah satu objek wisata yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan adalah Pulau Poncan. Pulau ini terletak sekitar 10 km² dari pusat Kota Sibolga yang dikenal dengan ekosistem lautnya yang beragam, termasuk terumbu karang, hamparan lamun dan biota laut lainnya (Saputra, et al., 2020). Secara geomorfologi, Pulau ini



didominasi substrait pasir putih kekuningan, perbukitan yang rendah serta terumbu karang. Beberapa fasilitas pendukung kegiatan wisata seperti penginapan, dermaga, area parkir, toilet sudah tersedia yaitu Sibolga Marine Resort namun pengembangan lebih lanjut masih terbatas pada kapasitas dan kualitas fasilitas tersebut. Aktivitas wisata populer di pulau ini meliputi snorkeling, diving, berenang, memancing, trekking ke gua bersejarah dan berkeliling pulau dengan perahu. Akan tetapi, Meskipun Pulau Poncan telah ditetapkan sebagai salah satu kawasan potensial Daerah Tujuan Wisata (DTW) di Kota Sibolga, jumlah wisatawan yang berkunjung masih terbatas dan belum memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara potensi alam yang dimiliki pulau ini dengan pengelolaan dan pengembangan yang masih terbatas

jumlah objek wisata di Kota Sibolga pada periode 2017 hingga 2024 terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu wisata bahari (*marine tourism*) dan wisata pegunungan (*highlands tourism*). Data menunjukkan bahwa jumlah objek wisata bahari relatif stabil dengan angka 4 objek wisata pada tahun 2017 hingga 2022. Namun demikian, pada tahun 2023 dan 2024 jumlah tersebut mengalami peningkatan menjadi 5 objek wisata. Sementara itu, jumlah objek wisata pegunungan cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2017 tercatat sebanyak 5 objek, kemudian menurun menjadi 4 objek pada periode 2018 hingga 2021, dan kembali meningkat menjadi 5 objek sejak tahun 2022 hingga 2024. Adapun objek wisata bahari yang dimaksud meliputi Pulau Poncan Gadang, Pulau Poncan Ketek, Pulau Sarudik, Pantai Ujung Sibolga, serta Pelabuhan Lama. Sementara itu, objek wisata pegunungan terdiri dari Tanggo Seratus, Bukit Pancuran Gerobak, Bukit Ketapang, serta Tor Simarbarimbing. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa perkembangan jumlah objek wisata di Kota Sibolga menunjukkan adanya upaya pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata namun belum menunjukkan adanya kontribusi nyata bagaimana kualitas maupun efektivitas pengembangan pariwisata tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan. Masih terdapat kekurangan dalam pengembangan dan pengelolaan wisata bahari di Pulau Poncan, Kota Sibolga, terutama pada kondisi penginapan yang kurang terawat serta fasilitas pendukung yang belum optimal. Hal ini berdampak pada menurunnya kenyamanan dan kepuasan wisatawan yang berkunjung. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan juga menjadi permasalahan, terlihat dari masih adanya kebiasaan membuang sampah sembarangan. Kondisi ini dapat mengurangi daya tarik wisata karena kebersihan merupakan faktor penting dalam pariwisata. Permasalahan tersebut disebabkan oleh belum diterapkannya prinsip keberlanjutan dalam pengembangan pariwisata. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang lebih terencana dan melibatkan berbagai pihak agar wisata bahari Pulau Poncan dapat berkembang secara berkelanjutan.

Adapun Penyelenggaraan pengelolaan pariwisata di Indonesia diawali dengan dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Undang-undang ini menjadi pedoman utama dalam pengelolaan dan pengembangan sektor pariwisata di tingkat nasional. Salah satu tujuan dari undang-undang ini adalah untuk memberikan dasar hukum yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pembangunan pariwisata di seluruh wilayah Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagai langkah operasional dari Undang-Undang Kepariwisata, pemerintah pusat menyusun Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (Ripparnas). Ripparnas ini merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang



berisi arah kebijakan, strategi, dan prioritas pembangunan sektor pariwisata di Indonesia. Dokumen ini memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pengembangan pariwisata yang sesuai dengan potensi lokal dan kebutuhan daerah masing-masing. Tanpa adanya pengelolaan destinasi wisata yang berbasis pada prinsip keberlanjutan, peningkatan jumlah wisatawan justru berpotensi menimbulkan berbagai tekanan terhadap ekosistem laut yang menjadi daya tarik utama Pulau Poncan. Pengelolaan wisata berbasis keberlanjutan pada dasarnya menekankan pada keseimbangan antara pemanfaatan potensi wisata dengan upaya pelestarian lingkungan, sehingga kegiatan pariwisata tidak merusak sumber daya alam yang menjadi daya tariknya. Dalam konteks wisata bahari, pengelolaan tersebut mencakup pengaturan aktivitas wisata seperti snorkeling dan diving agar tidak merusak terumbu karang, pengelolaan sampah wisatawan secara sistematis, pembatasan jumlah kunjungan sesuai daya dukung lingkungan, serta penerapan edukasi lingkungan kepada pengunjung dan masyarakat lokal. Apabila prinsip-prinsip ini tidak diterapkan secara konsisten, maka berbagai bentuk kerusakan ekosistem laut dapat terjadi, seperti kerusakan terumbu karang akibat aktivitas penyelaman yang tidak terkontrol, pencemaran laut akibat sampah plastik dan limbah wisata, serta terganggunya habitat biota laut seperti ikan karang dan padang lamun yang berfungsi sebagai tempat berkembang biaknya berbagai organisme laut. Permasalahan utama dalam pengembangan pariwisata bahari di Pulau Poncan pada dasarnya bukan terletak pada keterbatasan potensi sumber daya alam, melainkan pada aspek manajemen destinasi wisata yang belum dikelola secara optimal. Kondisi ini dapat dilihat dari beberapa fasilitas wisata yang belum tertata dengan baik dan kurang terawat sehingga tidak berfungsi secara maksimal. Misalnya, beberapa area penginapan dan fasilitas pendukung wisata yang tersedia masih terlihat kurang terpelihara, baik dari segi kebersihan maupun perawatan bangunan. Selain itu, ketersediaan sarana umum seperti tempat pembuangan sampah, papan informasi wisata, serta fasilitas pendukung aktivitas wisata bahari masih terbatas dan belum dikelola secara sistematis. Kondisi lingkungan di beberapa titik kawasan wisata juga menunjukkan adanya sampah yang berserakan di sekitar pantai maupun area pengunjung, yang mencerminkan rendahnya kesadaran pengunjung dan masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan wisata.

Di samping itu, minimnya kegiatan promosi juga menyebabkan Pulau Poncan masih kurang dikenal oleh wisatawan secara luas, baik di tingkat regional maupun nasional. Keterbatasan promosi ini berkaitan dengan belum optimalnya kapasitas pengelolaan destinasi wisata serta belum terintegrasinya strategi pemasaran pariwisata yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan. Ketidaksiapan infrastruktur penunjang wisata, seperti keterbatasan fasilitas transportasi menuju pulau, kurangnya sarana pendukung kegiatan wisata, serta lemahnya sistem tata kelola destinasi, turut menjadi faktor yang menurunkan daya tarik wisata Pulau Poncan. Selain itu, koordinasi antar pihak yang terlibat dalam pengembangan pariwisata, baik pemerintah daerah, pengelola wisata, maupun masyarakat lokal, masih tergolong lemah. Meskipun telah terdapat rencana induk pengembangan pariwisata, implementasi di lapangan masih sangat bergantung pada inisiatif individu dan belum berjalan secara terpadu. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola destinasi yang mencakup peningkatan komunikasi, koordinasi, serta kerja sama antar pemangku kepentingan agar pengembangan pariwisata bahari di Pulau Poncan dapat berjalan secara lebih terarah dan berkelanjutan.



Menurut Susanti, et al. (2022) pengembangan destinasi wisata bahari seperti Pulau Poncan memerlukan strategi berbasis keberlanjutan yang memperhatikan pelestarian lingkungan, pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, serta kepuasan wisatawan. Pengembangan wisata bahari tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga harus mampu menjaga keseimbangan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Permasalahan yang masih terjadi menunjukkan belum adanya indikator keberlanjutan pariwisata dan lemahnya sistem monitoring destinasi sehingga tata kelola pengembangan wisata berjalan lambat. Selain itu, koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri wisata masih perlu diperkuat agar pengembangan wisata bahari dapat dilakukan secara optimal. Putra & Nugroho (2023) menyatakan bahwa pelibatan masyarakat lokal mampu meningkatkan rasa memiliki terhadap objek wisata sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar. Penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian Daniel Harvey Tulis (2020) mengenai strategi pengembangan wisata bahari di Kecamatan Lirung menunjukkan bahwa potensi utama wisata bahari terletak pada keindahan alam, keaslian lingkungan, dan dukungan masyarakat, sedangkan aksesibilitas dan fasilitas penunjang masih menjadi hambatan utama. Hasil penelitian tersebut menghasilkan strategi Growth Oriented Strategy untuk mendukung pengembangan wisata bahari. Penelitian Khaerul Arifin Husein, Murtir Jeddawi, dan Irwan Tahir (2020) mengenai wisata bahari berbasis kearifan lokal di Kota Ternate menunjukkan bahwa pengembangan wisata dilakukan melalui pemanfaatan kekuatan lokal untuk mengatasi ancaman dan kelemahan pengembangan wisata. Penelitian Agnes Tuti Rumiati, Janti Gunawan & Nazihah Ekasari (2019) merumuskan indikator pembangunan wisata bahari berkelanjutan melalui pendekatan kuantitatif dan analisis klaster pada Desa Selong Belanak, Lombok Tengah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa indikator keberlanjutan mampu menggambarkan kekuatan dan kelemahan pengembangan wisata bahari. Research gap penelitian ini terletak pada minimnya pembahasan mengenai pengembangan destinasi wisata bahari sejak tahap perencanaan awal dengan pendekatan keberlanjutan yang sistemik, khususnya pada wilayah pulau kecil seperti Pulau Poncan. Selain itu, masih terbatas data empiris mengenai strategi pengembangan wisata bahari di Pulau Poncan yang memiliki potensi wisata tinggi namun belum dikembangkan secara terstruktur. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian berjudul “Pengembangan Destinasi Pariwisata Bahari Berkelanjutan di Pulau Poncan Kota Sibolga” bertujuan menganalisis potensi dan tantangan pengembangan wisata bahari secara komprehensif, merumuskan strategi pengembangan yang sesuai dengan kondisi lokal, serta mengkaji komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder dalam mendukung pengembangan wisata bahari berkelanjutan di Pulau Poncan Kota Sibolga.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian dilakukan untuk menganalisis pengembangan destinasi pariwisata bahari berkelanjutan di Pulau Poncan Kota Sibolga melalui pengkajian potensi wisata, pengelolaan destinasi, serta keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan stakeholder dalam pengembangan pariwisata bahari. Pendekatan kualitatif dipilih karena



penelitian berfokus pada pemahaman fenomena sosial dan kondisi nyata yang terjadi di lapangan secara mendalam. Menurut Sugiyono (2019), penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan guna memperoleh data yang lengkap mengenai pengembangan wisata bahari di Pulau Poncan. Penelitian ini menggunakan teori 4A dari Cooper (1995;2008) yang meliputi attraction, accessibility, amenities, dan ancillary services sebagai landasan untuk menganalisis pengembangan destinasi wisata bahari. Attraction digunakan untuk melihat daya tarik wisata Pulau Poncan seperti pantai, panorama laut, dan budaya masyarakat pesisir. Accessibility digunakan untuk menganalisis kemudahan akses transportasi menuju lokasi wisata. Amenities berkaitan dengan fasilitas pendukung wisata seperti penginapan, rumah makan, listrik, dan kebersihan lingkungan. Ancillary services digunakan untuk melihat dukungan pemerintah, pengelola wisata, serta masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata bahari. Menurut Yoeti (2006), pengembangan pariwisata harus memperhatikan keberlangsungan lingkungan, ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan agar hasil penelitian dapat menggambarkan pengembangan destinasi pariwisata bahari berkelanjutan di Pulau Poncan Kota Sibolga secara sistematis dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengembangan wisata Pulau Poncan Kota Sibolga berdasarkan indikator 4A (Attraction, Accessibility, Amenities, dan Ancillary Services) dalam perspektif pariwisata berkelanjutan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan dari unsur pemerintah, pengelola, Pokdarwis, masyarakat, dan wisatawan.

1. *Attraction* (Atraksi)

Attraction atau atraksi merupakan komponen utama dalam pengembangan destinasi wisata yang berfungsi sebagai daya tarik utama bagi wisatawan. Dalam konsep 4A, atraksi menjadi elemen inti yang menentukan keberhasilan suatu destinasi. Tanpa daya tarik yang kuat dan terkelola dengan baik, destinasi wisata tidak akan mampu mempertahankan kunjungan secara berkelanjutan. Dalam perspektif pariwisata berkelanjutan, pengembangan atraksi tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah wisatawan, tetapi juga harus mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan, keberlanjutan ekonomi masyarakat lokal, serta keseimbangan sosial di kawasan destinasi.



Gambar 1. Gambaran Pulau Poncan Kota Sibolga

Sumber: Google <https://bit.ly/4dPXYIR>

Pulau Poncan sebagai destinasi wisata bahari memiliki karakteristik utama berupa keindahan pantai, kejernihan air laut, serta kondisi alam yang relatif masih alami. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, seluruh informan menempatkan keaslian alam sebagai daya tarik utama Pulau Poncan. Keunikan tersebut menjadi nilai diferensiasi yang membedakan Pulau Poncan dari destinasi lain yang telah mengalami pembangunan masif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sibolga, beliau menyampaikan bahwa:

“Pulau Poncan termasuk kawasan lindung, jadi prinsipnya konservasi dulu baru pengembangan. Tidak boleh ada pembangunan yang merusak fungsi ekologisnya. Kalau rusak, dampaknya jangka panjang.” (Hasil wawancara dengan Ibu Mestika Tiurlan pada tanggal 29 September 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa secara kebijakan, pemerintah daerah telah menempatkan konservasi sebagai prioritas dalam pengembangan atraksi. Hal ini menandakan adanya kesadaran terhadap pentingnya perlindungan kawasan. Namun demikian, berdasarkan temuan penelitian, belum ditemukan aturan teknis yang secara spesifik mengatur batas daya dukung lingkungan maupun mekanisme pembatasan jumlah pengunjung. Artinya, komitmen tersebut masih berada pada level prinsip dan belum sepenuhnya diterjemahkan dalam instrumen pengendalian yang operasional. Hal ini diperkuat oleh Plt. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata yang menyatakan:

“Kami tidak memperbolehkan pembangunan atraksi permanen yang bisa merusak vegetasi atau ekosistem pesisir.” (Hasil wawancara dengan Ibu Irma Febriana pada tanggal 29 September 2025)

Keterangan ini menunjukkan adanya pembatasan terhadap pembangunan fisik sebagai bentuk perlindungan kawasan. Namun, jika dicermati lebih lanjut, pengawasan terhadap aktivitas non-fisik seperti snorkeling dan diving belum didukung oleh standar operasional prosedur (SOP) tertulis maupun sistem zonasi yang jelas dan terukur. Padahal, aktivitas tersebut memiliki potensi menimbulkan tekanan ekologis, Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya perlindungan kawasan masih perlu diperkuat, tidak hanya dari sisi pembangunan fisik, tetapi juga dalam pengendalian aktivitas wisata yang berlangsung di dalamnya. Selain itu, Plt. Bidang Pemasaran Pariwisata menyampaikan bahwa:

“Promosi tetap kami lakukan, tetapi tidak untuk wisata massal. Kami tidak ingin Pulau Poncan terlalu padat karena bisa merusak karakter alaminya.” (Hasil wawancara dengan Ibu Marito Napitupulu pada tanggal 29 September 2025)



Strategi promosi yang tidak diarahkan pada wisata massal menunjukkan adanya upaya menjaga keseimbangan antara peningkatan kunjungan dan daya dukung lingkungan. Namun, tanpa adanya sistem pencatatan jumlah wisatawan dan evaluasi berkala, pemerintah akan kesulitan mengukur apakah jumlah kunjungan yang ada masih dalam batas aman atau tidak. Dari sisi masyarakat Ketua Pokdarwis menyampaikan bahwa:

“Kalau alamnya rusak, otomatis ekonomi masyarakat juga ikut terganggu.” (Hasil wawancara dengan Ibu Nilawati pada tanggal 3 Oktober 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memahami hubungan langsung antara kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekonomi lokal. Kesadaran ini menjadi modal sosial yang penting dalam pengelolaan destinasi. Namun, kesadaran saja belum cukup apabila tidak diikuti dengan sistem pengawasan bersama dan pembagian peran yang jelas antar pihak. Penjaga Pulau Poncan juga menyatakan:

“Kami dari awal tidak ingin mengubah banyak kondisi pulau, karena yang dijual itu justru keaslian alamnya. Jadi pengembangannya lebih ke aktivitas seperti snorkeling, diving, dan trekking ringan.” (Hasil wawancara dengan Bapak Robert Reza pada tanggal 27 September 2025)

Fokus pada aktivitas berbasis alam menunjukkan arah pengembangan yang relatif selaras dengan prinsip keberlanjutan. Meski demikian, aktivitas wisata bahari tetap memerlukan regulasi teknis, seperti pembatasan zona penyelaman dan edukasi wisatawan, agar tidak berdampak pada kerusakan terumbu karang dalam jangka panjang. Sementara itu, dari perspektif wisatawan, salah satu informan menyatakan:

“Saya datang ke sini karena masih alami. Kalau sudah terlalu ramai atau banyak bangunan, mungkin tidak akan seindah sekarang.” (Hasil wawancara dengan Ibu Renata Sihombing pada tanggal 28 September 2025)

Wisatawan lain juga mengungkapkan kekhawatiran terhadap potensi kerusakan apabila jumlah pengunjung tidak dibatasi. Pernyataan wisatawan tersebut menunjukkan bahwa daya tarik Pulau Poncan justru terletak pada kondisi yang belum terlalu padat. Hal ini sekaligus menjadi pengingat bahwa peningkatan kunjungan tanpa pengendalian dapat menurunkan kualitas pengalaman wisata.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara tersebut, dapat dianalisis bahwa terdapat kesamaan persepsi antara pemerintah, pengelola, masyarakat, dan wisatawan mengenai pentingnya menjaga keaslian alam Pulau Poncan sebagai daya tarik utama. Secara normatif, seluruh pemangku kepentingan menunjukkan komitmen terhadap prinsip konservasi dan pengembangan yang tidak berlebihan. Dari temuan tersebut dapat dipahami bahwa attraction Pulau Poncan telah mengarah pada konsep wisata berbasis alam yang sejalan dengan prinsip pariwisata berkelanjutan, khususnya pada aspek lingkungan dan ekonomi. Akan tetapi, untuk mencapai keberlanjutan yang lebih substantif, diperlukan penguatan regulasi, sistem pengendalian daya dukung lingkungan, serta mekanisme monitoring yang lebih sistematis agar komitmen konservasi tidak hanya berhenti pada tataran kebijakan normatif, tetapi juga terimplementasi secara operasional di lapangan.



2. *Accessibility* (Aksesibilitas)

Berdasarkan hasil observasi, Pulau Poncan dapat ditempuh dari Kota Sibolga dalam waktu yang relatif singkat menggunakan perahu motor, dengan durasi perjalanan sekitar 10–15 menit tergantung kondisi cuaca. Tarif penyeberangan yang berlaku saat penelitian dilakukan adalah sekitar Rp50.000 per orang untuk perjalanan pulang-pergi. Umumnya, keberangkatan dilakukan pada pagi hari dan wisatawan kembali pada sore hari. Selama berada di pulau, wisatawan bebas melakukan berbagai aktivitas seperti berenang, snorkeling, bersantai di pantai, atau menikmati fasilitas yang tersedia. Kepala Bidang Pengembangan Dinas Pariwisata menyampaikan:

“Kalau dilihat dari jaraknya, Pulau Poncan itu sebenarnya sangat strategis karena dekat dari kota. Tapi karena aksesnya hanya lewat laut, jadi memang sangat tergantung pada kondisi cuaca. Kalau gelombang tinggi, kami tidak menyarankan penyeberangan karena faktor keselamatan lebih utama.” (Hasil wawancara dengan Ibu Mestika Tiurlan pada tanggal 29 September 2025)

Beliau juga menambahkan bahwa belum ada sistem transportasi khusus yang dikelola pemerintah secara langsung, melainkan masih mengandalkan perahu milik masyarakat. Keterangan ini menunjukkan bahwa meskipun akses secara fisik tergolong mudah dan tarif relatif terjangkau, sistem transportasinya masih berbasis kesepakatan langsung antara wisatawan dan pemilik perahu. Ketergantungan pada kondisi cuaca dan belum adanya pengelolaan resmi membuat kepastian layanan sangat bergantung pada situasi lapangan. Plt. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata menjelaskan lebih lanjut.

“Saat ini belum ada jadwal tetap untuk penyeberangan. Biasanya wisatawan datang ke pelabuhan, lalu bernegosiasi dengan pemilik perahu. Sistemnya masih fleksibel.” (Hasil wawancara dengan Ibu Irma Febriana pada tanggal 29 September 2025)

Temuan ini memperlihatkan bahwa sistem aksesibilitas masih bersifat fleksibel dan menyesuaikan kondisi permintaan. Di satu sisi, pola ini memberi ruang ekonomi bagi masyarakat pemilik perahu. Namun di sisi lain, belum adanya jadwal tetap dan sistem tiket resmi membuat wisatawan, terutama yang baru pertama kali datang, harus mencari informasi secara mandiri. Ketua Pokdarwis juga memberikan penjelasan yang lebih rinci:

“Biasanya kalau akhir pekan atau musim liburan, perahu cukup banyak karena permintaan tinggi. Tapi kalau hari biasa, wisatawan kadang harus menunggu sampai jumlah penumpang cukup. Kami belum punya sistem tiket atau loket resmi.” (Hasil wawancara dengan Ibu Nilawati pada tanggal 3 Oktober 2025)

Beliau juga menyebutkan bahwa tarif penyeberangan umumnya sudah memiliki kisaran harga yang dikenal masyarakat, yaitu sekitar Rp50.000 per orang, meskipun pembayaran tetap dilakukan secara langsung tanpa tiket resmi. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada standar harga tidak tertulis, mekanisme pencatatan penumpang belum berjalan secara formal. Dari sisi wisatawan, salah satu informan menyampaikan:

“Aksesnya sebenarnya mudah kalau sudah tahu caranya. Tapi untuk yang pertama kali datang, agak membingungkan karena tidak ada papan informasi atau petunjuk resmi.” (Hasil wawancara dengan Bapak Leon Davian Ritonga pada tanggal 28 September 2025)

Wisatawan lain menambahkan:



“Kami harus bertanya ke beberapa orang dulu sebelum menemukan titik keberangkatan perahu. Mungkin akan lebih baik kalau ada informasi yang lebih jelas.” (Hasil wawancara dengan Ibu Oktaviani pada tanggal 28 September 2025)

Secara analitis, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi geografis dan pengelolaan administratif. Pulau Poncan memiliki keunggulan lokasi yang strategis dan jarak tempuh yang singkat, namun belum didukung oleh sistem transportasi reguler, mekanisme pencatatan pengunjung, maupun informasi terpadu yang dapat diakses secara luas. Di sisi lain, sistem yang masih berbasis masyarakat ini secara tidak langsung berfungsi sebagai kontrol alami terhadap jumlah kunjungan. Kapasitas penyeberangan terbatas pada jumlah perahu yang tersedia dan kondisi cuaca, sehingga risiko lonjakan kunjungan secara tiba-tiba relatif lebih kecil. Kondisi ini dapat mendukung keberlanjutan lingkungan apabila dikelola secara terencana.

Namun, tanpa adanya sistem pencatatan jumlah wisatawan dan standar operasional tertulis, pemerintah daerah akan mengalami kesulitan dalam menghitung daya dukung lingkungan serta mengevaluasi dampak aktivitas wisata dalam jangka panjang. Dengan demikian, meskipun aksesibilitas saat ini belum menjadi hambatan utama, penguatan sistem pengelolaan tetap diperlukan agar pengembangan destinasi dapat berlangsung secara terukur dan berkelanjutan.

3. Amenities (Amenitas)

Amenitas merupakan elemen pendukung dalam suatu destinasi wisata yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan wisatawan selama berada di lokasi. Jika atraksi menjadi alasan kunjungan dan aksesibilitas menjadi sarana menuju destinasi, maka amenitas menentukan kenyamanan dan kualitas pengalaman wisatawan. Amenitas mencakup ketersediaan fasilitas seperti penginapan, tempat makan, toilet umum, tempat ibadah, fasilitas kebersihan, area istirahat, serta layanan pendukung lainnya. Di Pulau Poncan, amenitas memiliki peran penting karena karakteristiknya sebagai destinasi wisata bahari yang relatif alami. Tantangan utama dalam penyediaan fasilitas adalah menjaga keseimbangan antara kebutuhan kenyamanan wisatawan dan upaya pelestarian lingkungan.

Fasilitas kamar mandi dan toilet sudah tersedia dan dalam kondisi cukup lengkap untuk mendukung aktivitas wisatawan. Beberapa penginapan juga telah menyediakan kamar mandi dalam, sementara fasilitas umum tetap tersedia bagi pengunjung harian. Dari sisi konsumsi, terdapat restoran dan warung makan yang dikelola oleh masyarakat setempat dengan menu makanan laut dan hidangan lokal. Keberadaan restoran ini membantu wisatawan untuk tidak perlu kembali ke kota hanya untuk memenuhi kebutuhan makan. Selain itu, tersedia pula kapal untuk antar-jemput wisatawan dari Kota Sibolga menuju Pulau Poncan. Meskipun demikian, operasional kapal tetap bergantung pada kondisi cuaca. Apabila cuaca kurang bersahabat, pihak pengelola biasanya berkoordinasi dengan pemilik perahu dan masyarakat untuk memastikan keselamatan wisatawan. Dalam situasi tertentu, keberangkatan dapat ditunda demi keamanan bersama. Kepala Bidang Pengembangan Dinas Pariwisata menyampaikan bahwa:



“Kami mendorong penyediaan fasilitas, tetapi tidak boleh berlebihan. Konsepnya tetap menyesuaikan dengan karakter alam Pulau Poncan.” (Hasil wawancara dengan Ibu Mestika Tiurlan pada tanggal 29 September 2025)

Beliau juga menegaskan bahwa pembangunan fasilitas permanen dalam skala besar tidak menjadi prioritas, karena dikhawatirkan akan mengubah struktur alami kawasan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah menerapkan pendekatan pengembangan yang bersifat adaptif dan konservatif. Namun, pendekatan ini juga menimbulkan konsekuensi berupa keterbatasan fasilitas dibandingkan destinasi yang telah berkembang secara masif. Pengelola Rumah Rakit Terapung Poncan Sibolga menjelaskan:

“Fasilitas kami memang sederhana, tapi kami berusaha menjaga kebersihan dan kenyamanan. Wisatawan biasanya datang memang untuk suasana alami, bukan fasilitas mewah.” (Hasil wawancara dengan Bapak Rinal Hutabarat tanggal 27 September 2025)

Lebih lanjut beliau menyampaikan bahwa peningkatan fasilitas dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan finansial dan kebutuhan pasar. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan amenities sangat dipengaruhi oleh kapasitas pelaku usaha lokal. Dalam praktiknya, pengelola dan masyarakat sekitar juga saling bekerja sama untuk membantu wisatawan, baik dalam hal penyediaan konsumsi tambahan, kebutuhan mendadak, maupun bantuan ketika terjadi kendala cuaca. Ketua Pokdarwis juga menyampaikan:

“Kami sadar fasilitas masih terbatas, terutama untuk toilet umum dan pengelolaan sampah. Tapi kami berusaha memperbaiki secara bertahap.” (Hasil wawancara dengan Ibu Nilawati pada tanggal 3 Oktober 2025)

Dari sisi wisatawan, salah satu informan menyampaikan:

“Fasilitasnya memang tidak terlalu lengkap, tapi masih cukup untuk wisata alam. Yang penting bersih dan terawat.” (Hasil wawancara dengan Bapak Gavriel Panggabean pada tanggal 28 September 2025)

Namun, wisatawan lain menambahkan:

“Kalau ke depan pengunjung bertambah, mungkin fasilitasnya perlu ditambah supaya tidak kewalahan.” (Hasil wawancara dengan Ibu Juwita pada tanggal 28 September 2025)

Berdasarkan temuan penelitian yang diperoleh di lapangan, dapat ditegaskan bahwa kondisi amenities di Pulau Poncan masih belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pengembangan destinasi wisata secara optimal. Meskipun beberapa fasilitas dasar telah tersedia, seperti penginapan dengan variasi tipe kamar, kamar mandi yang cukup memadai, restoran, serta layanan kapal antar-jemput, keberadaan fasilitas tersebut pada dasarnya hanya mampu mendukung aktivitas wisata dalam skala kunjungan yang masih terbatas. Selain itu, pengelolaan fasilitas yang ada masih dilakukan secara mandiri oleh masing-masing pelaku usaha dan belum terintegrasi dalam suatu sistem pengelolaan yang terkoordinasi dengan baik.

Dengan demikian, meskipun fasilitas dasar telah tersedia dan masih mampu memberikan kenyamanan bagi wisatawan dalam kondisi kunjungan yang relatif terbatas, amenities di Pulau Poncan secara keseluruhan masih memerlukan penguatan dan pengembangan lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang lebih terstruktur terkait peningkatan kualitas fasilitas, penetapan standar pelayanan, pengelolaan sampah terpadu, serta pengaturan kapasitas fasilitas wisata agar pengembangan pariwisata di Pulau



Poncan dapat berjalan secara lebih berkelanjutan tanpa mengurangi kualitas lingkungan yang menjadi daya tarik utama destinasi tersebut.

4. Ancillary Services (Layanan Pendukung/Kelembagaan)

Ancillary services merujuk pada layanan pendukung serta sistem kelembagaan yang menunjang keberlangsungan suatu destinasi wisata. Berbeda dengan atraksi, aksesibilitas, dan amenitas yang lebih bersifat fisik, ancillary services berkaitan dengan dukungan kelembagaan, regulasi, koordinasi antar pemangku kepentingan, promosi, keamanan, serta sistem pengelolaan destinasi secara menyeluruh. Komponen ini sering kali tidak terlihat secara langsung oleh wisatawan, namun memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan pengembangan destinasi. Berdasarkan hasil penelitian, dukungan kelembagaan telah ada, namun masih dalam tahap penguatan terutama dalam aspek koordinasi, promosi, serta sistem pengelolaan destinasi secara terpadu. Kepala Bidang Pengembangan Dinas Pariwisata menyampaikan bahwa:

“Kami melakukan pembinaan kepada masyarakat dan Pokdarwis agar pengelolaan wisata tetap terarah. Tapi memang masih perlu peningkatan, terutama dalam hal koordinasi dan pengawasan.” (Hasil wawancara dengan Ibu Mestika Tiurlan pada tanggal 29 September 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan fungsi pembinaan terhadap masyarakat dan pelaku wisata. Namun demikian, penguatan sistem pengawasan serta koordinasi antar pihak masih menjadi tantangan dalam pengelolaan destinasi wisata Pulau Poncan. Plt. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata juga menjelaskan:

“Kami berusaha menjaga komunikasi dengan pengelola dan masyarakat. Namun karena keterbatasan sumber daya, pengawasan tidak bisa dilakukan setiap saat.” (Hasil wawancara dengan Ibu Irma Febrianti pada tanggal 29 September 2025)

Temuan ini menunjukkan adanya keterbatasan kapasitas kelembagaan, baik dari segi sumber daya manusia maupun sistem monitoring yang tersedia. Dalam konteks pengelolaan destinasi wisata yang berkelanjutan, konsistensi pengawasan dan koordinasi antar pemangku kepentingan merupakan faktor penting untuk memastikan aktivitas wisata berjalan secara tertib dan sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Anggota Pokdarwis menyampaikan:

“Kami berusaha menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Kalau ada keluhan wisatawan atau kebutuhan fasilitas, biasanya kami komunikasikan.” (Hasil wawancara dengan Ibu Rotua Siringoringo pada tanggal 3 Oktober 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pokdarwis memiliki peran penting sebagai mediator antara pemerintah, masyarakat, serta wisatawan. Peran ini membantu memperlancar komunikasi serta penyampaian informasi terkait kebutuhan pengembangan destinasi wisata Pulau Poncan. Namun demikian, sistem koordinasi yang berjalan saat ini masih bersifat informal dan belum sepenuhnya didukung oleh sistem manajemen yang terdokumentasi secara formal. Dari sisi pelaku usaha, pengelola Rumah Rakit Terapung menyampaikan:

“Kami lebih banyak bergerak secara mandiri dalam mengelola usaha. Untuk pelatihan atau pendampingan memang ada, tapi belum rutin.” (Hasil wawancara dengan Bapak Rinal Hutabarat pada tanggal 27 September 2025)



Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha lokal masih mengandalkan inisiatif pribadi dalam mengelola kegiatan usaha pariwisata. Dukungan dalam bentuk pelatihan dan peningkatan kapasitas dari pemerintah memang telah dilakukan, namun belum berjalan secara berkelanjutan. Padahal, dalam pengembangan destinasi wisata, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan wisata. Selain dukungan kelembagaan, aspek promosi juga menjadi bagian penting dalam ancillary services. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pariwisata, promosi pariwisata Kota Sibolga dilakukan melalui berbagai media, baik secara konvensional maupun digital. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata menyampaikan bahwa:

“Media promosi kita cukup banyak, seperti peta pariwisata, buku pariwisata, serta promosi melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram. Selain itu, kami juga melakukan promosi melalui kegiatan formal seperti pertemuan atau event pariwisata.” (Hasil wawancara dengan Ibu Marito pada tanggal 29 September 2025)

Beliau juga menjelaskan bahwa dalam promosi pariwisata Kota Sibolga terdapat jargon yang digunakan sebagai identitas daerah, yaitu *“MO KA SIBOGA”* yang memiliki arti Ayo ke Sibolga. Jargon ini digunakan sebagai ajakan kepada masyarakat luas untuk mengenal potensi wisata yang terdapat di Kota Sibolga, termasuk Pulau Poncan sebagai salah satu destinasi wisata bahari yang cukup dikenal. Selain itu, dalam kegiatan promosi juga dikenal ungkapan khas daerah yaitu *“Oi Dusanak”*, yang sering digunakan dalam berbagai kegiatan promosi maupun event pariwisata sebagai identitas budaya masyarakat pesisir Sibolga. Ibu Marito juga menjelaskan bahwa strategi promosi pariwisata saat ini mulai beralih ke penggunaan media digital dan konten kreatif, beliau menyatakan:

“Sekarang promosi lebih banyak dilakukan melalui media sosial dan pembuatan konten. Kalau semakin banyak orang membuat konten tentang Sibolga, seperti tentang pelabuhan lama atau Pulau Poncan, biasanya orang akan penasaran dan ingin datang berkunjung.” (Hasil wawancara dengan Ibu Marito pada tanggal 29 September 2025)

Selain promosi melalui media sosial, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sibolga juga pernah menyelenggarakan kegiatan promosi seperti lomba fotografi dan lomba pembuatan konten wisata untuk memperkenalkan destinasi wisata di Kota Sibolga kepada masyarakat yang lebih luas. Namun demikian, beliau juga mengakui bahwa promosi khusus untuk Pulau Poncan masih belum optimal. Beliau menyatakan:

“Kalau untuk promosi Pulau Poncan sendiri memang masih kurang efektif. Salah satu kendalanya karena lokasi yang harus ditempuh melalui perjalanan laut dan tidak semua orang nyaman melakukan perjalanan laut.” (Hasil wawancara dengan Ibu Marito pada tanggal 30 September 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa promosi Pulau Poncan masih menghadapi beberapa tantangan, baik dari segi aksesibilitas maupun strategi pemasaran yang belum sepenuhnya terfokus pada destinasi tersebut. Saat ini, pemerintah daerah juga sedang memprioritaskan pengembangan destinasi wisata lain sebagai tahap awal sebelum pengembangan yang lebih intensif dilakukan di Pulau Poncan. Secara analitis, ancillary services di Pulau Poncan menunjukkan bahwa struktur kelembagaan dasar telah terbentuk melalui keterlibatan pemerintah daerah, Pokdarwis, pelaku usaha, serta masyarakat lokal.



Kerja sama antar pihak tersebut menjadi modal sosial yang penting dalam mendukung keberlangsungan aktivitas pariwisata di kawasan tersebut.

Di sisi lain, keberadaan identitas promosi daerah seperti “*MO KA SIBOGA*” dan “*Oi Dusanak*” menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam membangun citra pariwisata Kota Sibolga secara lebih terarah dan berkelanjutan. Identitas ini tidak hanya berfungsi sebagai slogan, tetapi juga dapat menjadi elemen branding yang kuat dalam menarik perhatian wisatawan serta memperkuat karakter dan daya tarik destinasi. Melalui pemanfaatan branding yang konsisten, citra positif daerah diharapkan dapat semakin dikenal luas, baik di tingkat regional maupun nasional.

Dengan demikian, *ancillary services* di Pulau Poncan dapat dikategorikan telah memiliki dasar dukungan kelembagaan serta partisipasi masyarakat yang cukup baik. Hal ini tercermin dari adanya keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung aktivitas pariwisata, meskipun belum sepenuhnya terintegrasi secara optimal. Namun demikian, penguatan masih diperlukan terutama dalam aspek koordinasi formal antar pemangku kepentingan, pengembangan sistem monitoring berbasis data yang akurat, peningkatan kapasitas pelaku wisata, serta penyusunan strategi promosi yang lebih terpadu dan berkelanjutan.

Pembahasan

Teori pengembangan destinasi wisata yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori 4A yang dikemukakan oleh Cooper dkk. (2008), yang terdiri dari attraction, accessibility, amenities, dan ancillary services. Teori tersebut menjelaskan bahwa keberhasilan suatu destinasi wisata dipengaruhi oleh keberadaan daya tarik wisata, kemudahan akses, fasilitas pendukung, serta dukungan kelembagaan dalam pengelolaan destinasi. Dalam penelitian ini, teori 4A dianalisis melalui perspektif pariwisata berkelanjutan yang menitikberatkan pada keseimbangan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Pengembangan destinasi wisata tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan jumlah wisatawan, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Menurut Cooper dkk. (2008), attraction menjadi komponen utama yang mendorong wisatawan berkunjung ke suatu destinasi wisata. Berdasarkan hasil penelitian, attraction Pulau Poncan terletak pada keindahan alam, kejernihan air laut, pasir putih, serta suasana pesisir yang masih alami. Pemerintah daerah juga membatasi pembangunan permanen guna menjaga ekosistem pesisir tetap terpelihara. Hal tersebut menunjukkan adanya penerapan prinsip keberlanjutan lingkungan dalam pengelolaan wisata bahari. Akan tetapi, pengembangan atraksi wisata masih memerlukan diversifikasi produk wisata seperti paket snorkeling, diving, maupun wisata budaya agar manfaat ekonomi bagi masyarakat dapat meningkat secara optimal. Selain attraction, accessibility menjadi indikator penting dalam pengembangan destinasi wisata. Cooper dkk. (2008) menjelaskan bahwa aksesibilitas berkaitan dengan kemudahan wisatawan mencapai lokasi wisata melalui transportasi, infrastruktur, dan informasi pendukung. Berdasarkan hasil penelitian, akses menuju Pulau Poncan masih menggunakan transportasi laut berupa perahu dari Kota Sibolga. Walaupun lokasi pulau cukup dekat dari pusat kota, kondisi cuaca dan gelombang laut masih menjadi hambatan terhadap kenyamanan wisatawan. Menurut Oktavianita (2019), aksesibilitas yang baik dapat meningkatkan kenyamanan perjalanan wisatawan dan mendukung perkembangan



destinasi wisata. Dari aspek sosial dan ekonomi, keberadaan transportasi laut yang dikelola masyarakat lokal memberikan peluang pendapatan bagi masyarakat pesisir. Namun keterbatasan akses dan belum terintegrasinya sistem transportasi wisata menyebabkan pengembangan wisata bahari Pulau Poncan belum berjalan maksimal. Pada indikator amenities, Cooper dkk. (2008) menjelaskan bahwa fasilitas wisata seperti penginapan, tempat makan, toilet umum, dan sarana kebersihan sangat menentukan kepuasan wisatawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pulau Poncan telah memiliki fasilitas dasar berupa penginapan sederhana dan rumah rakit terapung, tetapi kualitas dan jumlah fasilitas masih terbatas. Menurut Kotler (2019), fasilitas wisata merupakan bagian penting dalam mendukung kenyamanan wisatawan selama melakukan perjalanan wisata. Indikator ancillary services dalam teori 4A berkaitan dengan dukungan kelembagaan, regulasi, promosi, dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan destinasi wisata. Berdasarkan hasil penelitian, pengembangan wisata Pulau Poncan melibatkan Dinas Pariwisata, Pokdarwis, serta masyarakat lokal. Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan promosi wisata, sedangkan masyarakat berperan dalam pengelolaan aktivitas wisata bahari. Menurut Masjhoer (2019), pengembangan pariwisata bahari memerlukan keterpaduan antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha agar pengelolaan destinasi dapat berjalan berkelanjutan. Akan tetapi, koordinasi antar stakeholder di Pulau Poncan masih memerlukan penguatan terutama dalam penyusunan sistem pengelolaan jangka panjang dan pengawasan destinasi wisata. Secara keseluruhan, teori 4A Cooper dkk. (2008) memiliki kesesuaian dengan kondisi empiris Pulau Poncan karena seluruh indikator telah tersedia dan dijalankan. Namun implementasinya masih memerlukan penguatan pada aspek pengelolaan ekonomi, peningkatan fasilitas wisata, integrasi kelembagaan, serta perencanaan wisata berbasis keberlanjutan agar pengembangan destinasi wisata bahari Pulau Poncan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa pengembangan destinasi pariwisata bahari berkelanjutan di Pulau Poncan Kota Sibolga telah memiliki potensi yang cukup besar melalui keindahan alam, panorama laut, serta keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan wisata. Berdasarkan analisis menggunakan Teori 4A Cooper dkk. (2008), indikator attraction, accessibility, amenities, dan ancillary services telah tersedia dan berjalan dalam pengelolaan wisata Pulau Poncan. Attraction menjadi kekuatan utama melalui keaslian lingkungan dan daya tarik wisata bahari yang masih alami. Accessibility telah tersedia melalui transportasi laut, meskipun masih dipengaruhi kondisi cuaca dan keterbatasan sarana transportasi. Amenities berupa penginapan, rumah makan, dan fasilitas dasar telah tersedia, namun kualitas dan jumlah fasilitas masih memerlukan peningkatan. Ancillary services juga telah berjalan melalui dukungan pemerintah daerah, Pokdarwis, dan masyarakat lokal, walaupun koordinasi dan sistem pengelolaan destinasi masih perlu diperkuat. Pengembangan wisata bahari Pulau Poncan telah mengarah pada prinsip keberlanjutan melalui upaya menjaga kelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal. Akan tetapi, pengelolaan destinasi masih memerlukan peningkatan pada aspek perencanaan jangka panjang, penguatan kelembagaan,



pengembangan fasilitas wisata, serta strategi promosi yang lebih terintegrasi agar pengembangan wisata bahari dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Fahrudin, A., & Krisanti, M. (2021). Keberlanjutan Pengelolaan Wisata Bahari Di Pulau Pari, Kabupaten Kepulauan Seribu. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 26(2), 284-291.
- Handayani, S., Wahyudin, N., & Khairiyansyah, K. (2019). Fasilitas, Aksesibilitas Dan Daya Tarik Wisata Terhadap Kepuasan Wisatawan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 20(2), 123-133.
- Husein, K. A., Jeddawi, M., & Tahir, M. I. (2019). Pengembangan Objek Wisata Bahari Berbasis Kearifan Lokal Di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. *Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia*, 11(5), 859-865.
- Mirah, R. E., Rondonuwu, D. M., & Siregar, F. O. (2024). Analisis Pengembangan Infrastruktur Pariwisata Di Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara. *Media Matrasain*, 21(2), 1-10.
- Mushonnif, M., Al Fajar, AH, Mudfainna, M., & Syamraeni, S. (2025). Inovasi Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Agrowisata: Studi Kasus Kampung Flory, Sleman. *Jurnal Agribisnis dan Pembangunan Pedesaan (Jurnal Agribisnis dan Pengembangan Pedesaan)*, 7 (2), 143-154.
- Nurlaily, DK, & Giriwati, NSS (2024). Evaluasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Keberlanjutan Kampung Payung Pandanwangi, Kota Malang. *Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia*, 13 (4), 168-180.
- Rahmaniah, I. The Perception Imbalance And The Indicator Comprehension Of Sustainable Development In Regional Planning Of Sukabumi, West Java Province. Tesis. Sekolah Pasca Sarjana IPB.
- Rumiati, A. T., Gunawan, J. & Ekasari, N. (2019). Developing indicators to measure sustainable marine tourism development study case: in Selong Belanak village, West Praya, Central Lombok Province. *People: International Journal of Social Sciences*, 5(2), 833–847
- Riska, R., Ramadani, F., Purwasih, R. (2020). Analisis pengembangan wisata bahari pantai apparalang di Bulukumba Analysis of the development of marine tourism at Apparalang Beach in Bulukumba. *Jurnal Universitas Hasanuddin: Seminar Sains Dan Teknologi Kelautan*, 3(1), 93–97.
- Ritonga, RM, & Halim, CC (2025). Strategi Pengembangan Kampung Wisata Tematik Danau Kalpataru sebagai Wisata Urban Nature Berbasis Partisipasi Masyarakat di Banjar Wijaya, Tangerang. *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8 (2), 2006-2013.



- Saputra, Heldi, and Syafri Harto. 2016. "Dampak Pelaksanaan Event Internasional Sail Indonesia Terhadap Perkembangan Wisata Bahari Indonesia." *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 3 9.
- Sayogi, K. W., & Demartoto, A. (2018). Pengembangan Pariwisata Bahari. *Journal Of Development And Social Change*, 1(1), 1-5.
- Sulaksmi, R. 2007. Analisis Dampak Pariwisata terhadap Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Kawasan Taman Wisata Alam Laut Pulau Weh Kota Sabang. Tesis. Sekolah Pasca Sarjana IPB.
- Sero, A. (2020). Model Pengembangan Pariwisata Bahari Berbasis Masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara. Universitas Gadjah Mada.
- Triyono, J., & Nugroho, Dy (2023). Pengembangan Ekowisata Bahari Pantai Karang Jahe Melalui Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan. *Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin* , 3 (3), 340-350.
- Tulis, Daniel Harvey, Michael M. Rengkung, and Johannes Van Rate. 2020. "Strategi Pengembangan Objek Wisata Bahari Di Kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud." *Sabua: Jurnal Lingkungan Binaan Dan Arsitektur* 9(2):125–32.
- Wati, E. P. (2018). Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan. *Bina Hukum Lingkungan*, 3(1), 119- 126.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009.
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68.
- Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kota Sibolga Tahun 2020-2025.

Buku

- Bakaruddin, D. (2020). *Dasar-Dasar Pariwisata: Konsep, Pengelolaan Dan Pembangunan* (Hal. 72). Penerbit Pendidikan Indonesia.
- Cooper, C., Fletcher, J., Fyall, A., Gilbert, D., & Wanhill, S. (2008). *Tourism: Principles and practice* (4th ed.). Pearson Education.
- Creswell, J. W. (2011). *Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Pendidikan*.
- Damanik, D., Nasrullah, N., Purba, B., Arfandi, A. S., Abdillah, D., Raditya, R., ... & Faried, A. I. (2022). *Ekonomi Pariwisata: Konsep Pemasaran Dan Pembangunan*.



- Elkington, J. (1997). *Cannibals with forks Triple bottom line of 21st century business*. Stoney Creek, CT: New Society Publishers.
- Husin, A., Andriani, D. S., & Saputra, A. (2022). *Pengembangan Wisata*. Bening Media Publishing.
- Masjhoer, J. M. (2019). *Pengantar Wisata Bahari*. Jussac M Masjhoer.
- Peranginangin, J. (2025). *Manajemen Desa Wisata*. Jakarta: PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Revida, E., Purba, S., Simanjuntak, M., Permadi, L. A., Simarmata, M. M., Fitriyani, E., ... & Purba, B. (2022). *Manajemen Pariwisata*. Yayasan Kita Menulis.
- Sugiyono, (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Suprayitno, D., Ahmad, A., Tartila, T., Sa'dianoor, S. D., & Aladdin, Y. A. (2024). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori Komprehensif Dan Referensi Wajib Bagi Peneliti*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sutiksno, D. U., Revida, E., Munsarif, M., Simarmata, H. M., Saputra, D. H., Purnomo, A., ... & Purba, S. (2020). *Tourism Marketing*. Yayasan Kita Menulis.
- Yoeti, A, Yoeka. 2012. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa